



PENANGANAN STUNTING UNTUK KESEJAHTERAAN ANAK

Mohammad Teja*

Abstrak

Penanganan stunting menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia. Pembelajaran dari beberapa negara yang berhasil melakukan penurunan stunting menjadi kebutuhan untuk memperdalam pemahaman terkait penanganan stunting. Tulisan ini bertujuan mengkaji penanganan stunting untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan melihat praktik terbaik di Peru, Senegal, dan Ethiopia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) telah menandatangani MoU untuk memperkuat kolaborasi, termasuk dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Praktik di Peru, Senegal, dan Ethiopia menekankan perlunya pendekatan integratif lintas sektoral, pemberdayaan komunitas, dan kepemimpinan yang kuat dalam penanganan stunting. Indonesia dapat mengadopsi praktik-praktik tersebut dengan menyesuaikan konteks lokal dan memperkuat koordinasi antarsektor serta pelibatan masyarakat secara aktif. Komisi VIII DPR RI dapat berperan dalam mendorong pendekatan yang integratif dalam penanganan stunting, antara lain melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dengan mengawal implementasi MoU antara KemenPPPA dan Kemensos untuk mempercepat penurunan stunting demi kesejahteraan anak Indonesia yang lebih baik.

Pendahuluan

Komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan penurunan *stunting* sebagai prioritas nasional menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia saat ini. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia agar mampu menjadi generasi penerus yang sehat dan produktif menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selaras dengan hal tersebut, saat ini berbagai daerah fokus pada upaya penurunan *stunting*. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak misalnya, menargetkan *stunting* turun hingga 2 persen (Lathif, 2025). Awal Mei ini Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan memberdayakan masyarakat untuk menekan kasus *stunting*. Pemerintah Kota Solo mengintensifkan

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: teja@dpr.go.id

penanganan *stunting*, terlebih setelah adanya penambahan dua kasus aktif pada balita baru-baru ini (Kurniawan, 2025).

Percepatan penurunan *stunting* menjadi kebutuhan, mengingat prevalensi *stunting* nasional tahun 2024 masih sebesar 19,8 persen, di atas target 2024 sebesar 14 persen (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025). Mengingat *stunting* adalah isu yang kompleks, kajian dari berbagai negara akan memperkaya pemahaman terkait penanganan *stunting*. Peru, Senegal, dan Ethiopia merupakan contoh negara yang berhasil melakukan penurunan *stunting*. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan mengkaji penanganan *stunting* untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan melihat praktik terbaik di Peru, Senegal, dan Ethiopia.

Penanganan *Stunting* dan Kesejahteraan Anak

Stunting adalah salah satu kondisi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan anak karena menghambat terpenuhinya hak-hak dasar anak. *Stunting* tidak hanya menjadi masalah medis atau gizi, tetapi juga cerminan dari ketimpangan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh UNICEF (2020) yang menyebutkan bahwa *stunting* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena menghambat potensi maksimal mereka. Hal ini juga diperkuat hasil penelitian Febriyanti *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *stunting* dengan perkembangan sosial emosional balita. Oleh sebab itu, keberhasilan penanganan *stunting* menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan anak.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan perwujudan komitmen pemerintah terhadap penanganan *stunting*. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *stunting* (Kementerian Sekretariat Negara, 2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga memiliki strategi dalam penanganan *stunting*. Beberapa langkah yang telah dilakukan KemenPPPA, antara lain: peningkatan kapasitas perempuan dan keluarga dalam pengasuhan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja, serta kampanye dan sosialisasi kesetaraan gender dalam pengasuhan (KemenPPPA, 2022).

Selain KemenPPPA, terdapat Kementerian Sosial (Kemensos) yang berperan dalam pemberdayaan sosial dan perlindungan kelompok rentan, termasuk penyediaan layanan rehabilitasi sosial dan medis serta penguatan sentra terpadu untuk mendukung keluarga dan anak-anak yang terdampak *stunting*. Kedua kementerian ini telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 21 April 2025 untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan isu perempuan dan anak, termasuk percepatan penurunan *stunting* (Kementerian Sosial, 2025).

Di sisi lain, fakta di lapangan menyebutkan, meskipun prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 30,8 persen pada 2018 (Riskesdas) menjadi 19,8 persen pada 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (Kemenko PMK, 2025), angka tersebut masih di atas target nasional sebesar 14 persen pada 2024 dan sedikit di bawah rata-rata regional Asia yang mencapai 21,8 persen. Sebanyak 135 kabupaten/kota di 14 provinsi telah diidentifikasi sebagai hotspot *stunting* yang memerlukan intervensi khusus dan intensif (Kementerian Kesehatan, 2023). Untuk mencapai target penurunan *stunting*, penanganan *stunting* perlu dioptimalkan. Pendekatan integratif diperlukan untuk mengatasi akar masalah *stunting* yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan anak.

Praktik Terbaik Penanganan *Stunting*: Peru, Senegal, dan Ethiopia

Peru berhasil menurunkan prevalensi *stunting* anak di bawah usia lima tahun dari 31,3 persen pada tahun 2000 menjadi 13,1 persen pada tahun 2016 melalui pendekatan multisektoral yang komprehensif. Model intervensi yang diterapkan tidak hanya peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga perbaikan sanitasi dan air bersih, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Pendekatan multisektoral ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta partisipasi aktif masyarakat dan organisasi nonpemerintah. Pelajaran penting dari kasus Peru adalah bahwa penanganan *stunting* tidak cukup hanya dengan suplementasi makanan, tetapi harus melibatkan perbaikan kondisi sosial ekonomi dan koordinasi lintas sektor yang kuat (Huicho *et al.*, 2022).

Senegal juga menunjukkan keberhasilan serupa, dengan penurunan *stunting* sebesar 17,9 persen antara tahun 1992 hingga 2017. Faktor kunci keberhasilan Senegal adalah stabilitas politik yang memungkinkan pemerintah memprioritaskan isu nutrisi dan melaksanakan program penanganan *stunting* secara konsisten. Selain itu, peningkatan pendidikan ibu, akses air bersih dan sanitasi, serta pengurangan kemiskinan menjadi faktor pendukung utama. Senegal juga memanfaatkan program berbasis komunitas yang menekankan pelibatan kader kesehatan lokal yang terlatih dan pemberdayaan ibu-ibu dalam praktik pemberian makanan dan perawatan anak. Model ini menunjukkan bahwa intervensi yang berakar pada komunitas dan didukung oleh kebijakan nasional yang stabil dapat menghasilkan penurunan *stunting* yang signifikan dan berkelanjutan (Brar *et al.*, 2022).

Adapun Ethiopia berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dari 51 persen pada tahun 2000 menjadi 32 persen pada tahun 2016 melalui intervensi multisektoral yang menitikberatkan pada sektor pertanian, akses layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Selain itu, peningkatan pendidikan perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan angka *stunting*, karena ibu yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak. Intervensi ini juga didukung oleh strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses air bersih serta sanitasi yang lebih baik (Tasic *et al.*, 2020).

Praktik terbaik pada tiga negara tersebut di atas menunjukkan pentingnya pendekatan integratif lintas sektoral, pemberdayaan komunitas, dan kepemimpinan politik yang kuat dalam penanganan *stunting*. Indonesia dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik ini dengan menyesuaikan konteks lokal dan memperkuat koordinasi antarsektor serta melibatkan masyarakat secara aktif.

Untuk mempercepat penurunan *stunting*, pemerintah perlu mengadopsi beberapa alternatif kebijakan, antara lain: (1) penguatan pendekatan integratif lintas sektoral yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan sosial ekonomi secara terpadu; (2) inovasi program berbasis komunitas dengan pemberdayaan kader dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi; (3) peningkatan alokasi anggaran yang berkelanjutan dan transparan dengan mekanisme pengawasan yang ketat; (4) pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi program secara *real-time*; (5) pengembangan suplemen lokal yang terjangkau dan mudah diakses untuk meningkatkan konsumsi gizi ibu dan anak; (6) penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung intervensi gizi dan kesehatan anak secara menyeluruh; (7) kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk memperluas cakupan dan kualitas program; (8) adopsi praktik terbaik dari negara-negara lain yang menekankan pentingnya intervensi lintas sektor, pemberdayaan komunitas, dan inovasi teknologi dalam penanganan *stunting* secara efektif dan berkelanjutan.

Penutup

Praktik terbaik di Peru, Senegal, dan Ethiopia menunjukkan perlunya pendekatan integratif dalam penanganan *stunting*. Peru menekankan intervensi yang melibatkan perbaikan determinan sosial ekonomi, perubahan kebijakan di sektor kesehatan dan nonkesehatan, serta implementasi intervensi kesehatan yang berkelanjutan. Senegal fokus pada pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Sementara Ethiopia menitikberatkan pada sektor pertanian, akses layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Indonesia dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik ini dengan menyesuaikan konteks lokal serta memperkuat koordinasi dan partisipasi masyarakat.

Komisi VIII DPR RI dapat berperan dalam mendorong pemerintah melakukan pendekatan yang integratif dalam penanganan *stunting*. Pendekatan tersebut antara lain melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dengan mengawal implementasi MoU antara KemenPPPA dan Kemensos dalam penanganan *stunting* untuk mempercepat penurunan *stunting* demi kesejahteraan anak Indonesia yang lebih baik.

Referensi

- Brar, A. K., Chandrasekaran, S., Powers, B. L., & El-Sayed, Y. Y. (2022). Drivers of stunting reduction in Senegal: a country case study. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916522009601>
- Febriyanti, Vita Dwi; Astuti, Indra Tri; Khasanah, Nopi Nur. (2022). Hubungan antara Stunting dengan Perkembangan Sosial Emosional Anak Balita Usia 24-59 Bulan di Kelurahan Bandarharjo Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1), 296–310 .
- Huicho, L., Segura, E. R., Huayanay-Espinoza, C. A., Niño, M. M., Paca-Palao, A., & Gil, F. (2022). *Drivers of stunting reduction in Peru: a country case study*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916522009571>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, Januari 25). *Prevalensi stunting di Indonesia turun ke 21,6% dari 24,4%*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca /rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2013, Januari 27) *Capai Indonesia emas, tangani stunting dan kemiskinan ekstrem*. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/capai-indonesia-emas-tangani-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025, April 21). Mensos dan Menteri PPPA Tandatangan MoU Peningkatan Sinergi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. [kemensos.go.id](https://kemensos.go.id/index.php/berita-terkini/menteri-sosial/Mensos-dan-Menteri-PPPA-Tandatangan-MoU-Peningkatan-Sinergi-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak). <https://kemensos.go.id/index.php/berita-terkini/menteri-sosial/Mensos-dan-Menteri-PPPA-Tandatangan-MoU-Peningkatan-Sinergi-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak>
- Tasić, D., Stamenković, M., Nikolić, M., & Jovičić, N. (2020). *Drivers of stunting reduction in Ethiopia: a country case study*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844167/>

